

Membentuk Peserta Didik Memahami Pentingnya Kesempatan yang Sama dalam Memperoleh Pendidikan dan Pekerjaan

Armela Nababan¹, Eniwati Nduru², Lenny Lubis³, Hisardo Sitorus⁴

¹⁻⁴ Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Email: armelanababan711@gmail.com¹, eniw9099@gmail.com², lennylubis1234@gmail.com³, hisardositorus2020@gmail.com⁴

*Korespondensi Penulis: armelanababan711@gmail.com

Abstract. *Equality in education and employment is an important foundation for realizing social justice as mandated by Pancasila and the 1945 Constitution. Equality means that every individual has the same rights to access, treatment, and opportunities without discrimination based on gender, religion, ethnicity, social status, or physical condition. In education, equality is realized through equal access to learning facilities, an inclusive curriculum, and equal opportunities for all students to develop. Meanwhile, in the field of employment, equality includes fair opportunities in recruitment, promotion, training, and commensurate income. Education plays a strategic role in building awareness of equality by instilling the values of empathy, tolerance, and social justice. A multicultural approach and inclusive education are key to shaping students who value diversity and reject discrimination. Although various policies have been implemented, such as the Smart Indonesia Card (KIP) and affirmative action programs for marginalized groups, challenges such as socio-economic inequality, discrimination, the digital divide, and weak policy implementation remain major obstacles. Therefore, comprehensive efforts are needed, encompassing policy reform, improving teacher quality, and implementing pluralism-based character education to create a just, inclusive, and equal Indonesian society.*

Keywords: *Discrimination; Education; Employment; Inclusivity; Social Justice*

Abstrak. Kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Kesetaraan berarti setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses, perlakuan, dan peluang tanpa diskriminasi berdasarkan gender, agama, suku, status sosial, atau kondisi fisik. Dalam bidang pendidikan, kesetaraan diwujudkan melalui akses yang merata terhadap fasilitas belajar, kurikulum yang inklusif, dan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik untuk berkembang. Sementara dalam bidang pekerjaan, kesetaraan mencakup kesempatan yang adil dalam rekrutmen, promosi, pelatihan, serta penghasilan yang sepadan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kesetaraan melalui penanaman nilai-nilai empati, toleransi, dan keadilan sosial. Pendekatan multikultural dan pendidikan inklusif menjadi kunci dalam membentuk peserta didik yang menghargai keberagaman dan menolak diskriminasi. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program afirmatif bagi kelompok marjinal, tantangan seperti ketimpangan sosial-ekonomi, diskriminasi, kesenjangan digital, dan lemahnya implementasi kebijakan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif yang mencakup reformasi kebijakan, peningkatan kualitas guru, serta pendidikan karakter berbasis pluralisme untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, inklusif, dan setara.

Kata kunci: Diskriminasi; Inklusivitas; Keadilan Sosial; Pendidikan; Pekerjaan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini merupakan kekayaan sekaligus tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan inklusif. Dalam konteks pluralisme dan multikulturalisme, salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjamin bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, etnis, atau agama memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga

negara berhak mendapatkan pendidikan. Demikian pula dalam konteks pekerjaan, pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, dalam realitas sosial, belum semua warga negara dapat menikmati hak tersebut secara adil dan merata. Masih banyak terjadi ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah, khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara kelompok kaya dan miskin, atau antara mayoritas dan minoritas. Hal yang sama juga terjadi dalam dunia kerja, di mana diskriminasi berbasis gender, etnis, status sosial, bahkan disabilitas masih menjadi hambatan dalam memperoleh kesempatan kerja yang layak.

Kesenjangan sosial ini dapat menghambat tercapainya cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga membentuk kesadaran kritis peserta didik mengenai pentingnya nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendidikan multikultural dan pendekatan pluralistik menjadi salah satu strategi penting dalam membangun pemahaman dan sikap tersebut.

Pendidikan multikultural tidak hanya mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan, tetapi juga untuk menyadari adanya ketidakadilan struktural yang menyebabkan sebagian kelompok masyarakat terpinggirkan. Dengan memahami hal ini, peserta didik diharapkan memiliki empati sosial dan kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat. Hal ini juga sangat relevan dalam mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab di masa depan.

Lebih dari itu, peserta didik juga harus dipersiapkan untuk menghadapi realitas global yang semakin kompleks, di mana kemampuan untuk bekerja sama dengan orang dari latar belakang berbeda menjadi kunci keberhasilan. Dengan membentuk pemahaman yang kuat tentang pentingnya kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan, maka akan tumbuh generasi yang memiliki sensitivitas sosial dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilan, serta kesetaraan.

Melalui makalah ini, penulis ingin mengupas lebih dalam bagaimana pendidikan dapat berperan aktif dalam membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap kesetaraan dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Pembahasan ini akan melihat dari sudut pandang teori pluralisme dan multikulturalisme serta relevansinya dalam konteks pendidikan di Indonesia. Selain itu, makalah ini juga akan menyajikan strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan tersebut kepada peserta didik sejak dini.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Kesetaraan dalam Pendidikan dan Pekerjaan

Kesetaraan atau persamaan kesempatan dalam konteks pendidikan dan pekerjaan berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses, perlakuan, dan peluang tanpa diskriminasi, baik berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, suku, status sosial, kondisi fisik, maupun latar belakang ekonomi.

a. Kesetaraan dalam Pendidikan

Kesetaraan dalam pendidikan mengacu pada kondisi di mana setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, mulai dari tingkat dasar hingga tinggi. Artinya: 1) Tidak ada diskriminasi terhadap anak perempuan, anak berkebutuhan khusus, atau anak dari keluarga miskin. 2) Akses terhadap fasilitas pendidikan seperti sekolah, guru yang kompeten, dan sarana pembelajaran harus merata. 3) Kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi dirancang untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan peserta didik.

Contoh praktik kesetaraan dalam pendidikan:

- a Anak dari desa terpencil mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama dengan anak di kota.
- b Anak difabel mendapatkan layanan pendidikan inklusif sesuai kebutuhannya.
- c Anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

b. Kesetaraan dalam Pekerjaan

Kesetaraan dalam pekerjaan berarti bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan, mempertahankan, dan berkembang dalam pekerjaan tanpa perlakuan diskriminatif.

Artinya: 1) Setiap orang dinilai berdasarkan kemampuan dan kualifikasi, bukan atas dasar latar belakang pribadi. 2) Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jabatan, promosi, pelatihan, dan penghasilan yang setara untuk pekerjaan yang sama nilainya. 3) Perusahaan dan institusi tidak boleh menolak pelamar kerja karena suku, agama, gender, atau kondisi fisik.

Contoh praktik kesetaraan dalam pekerjaan:

- a Wanita dan pria mendapatkan gaji yang sama untuk posisi dan tanggung jawab yang sama.
- b Penyandang disabilitas diberi kesempatan bekerja dengan dukungan fasilitas yang sesuai.

- c Proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan objektif, bukan karena koneksi atau status sosial.

Mengapa Peserta Didik Harus Memahami Pentingnya Kesempatan yang Sama dalam Memperoleh Pendidikan dan Pekerjaan, Peserta didik adalah generasi penerus yang kelak akan menjadi pemimpin, pekerja, pendidik, dan pengambil kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memahami arti dan pentingnya kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan karena:

a Menumbuhkan Rasa Keadilan dan Empati

Dengan memahami pentingnya kesetaraan, peserta didik akan lebih peka terhadap ketidakadilan sosial dan memiliki empati terhadap mereka yang kurang beruntung.

b Menghindari Sikap Diskriminatif

Pengetahuan tentang pentingnya kesempatan yang sama akan membantu peserta didik menghindari sikap membedakan orang berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, atau status ekonomi.

c Membangun Lingkungan yang Inklusif

Sekolah dan tempat kerja yang inklusif dimulai dari individu yang memiliki pemahaman akan kesetaraan. Peserta didik yang paham akan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang saling menghargai.

d Persiapan Menghadapi Dunia Nyata

Dunia kerja dan masyarakat di masa depan menuntut kolaborasi lintas latar belakang. Pemahaman kesetaraan membekali peserta didik dengan sikap profesional dan terbuka dalam menghadapi keberagaman.

e Mendukung Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Setara

Ketika peserta didik memahami dan menerapkan nilai kesetaraan, mereka akan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang menjunjung hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam praktiknya, kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan masih menjadi masalah kompleks. Kesetaraan di sini berarti bahwa semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, termasuk akses terhadap sumber daya pendidikan dan peluang kerja yang layak. Di bidang pendidikan, masih terjadi ketimpangan kualitas dan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara kelompok kaya dan miskin, serta antara kelompok mayoritas dan minoritas. Banyak anak dari keluarga kurang mampu terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi

atau akses. Di sisi lain, sebagian besar pekerjaan formal masih didominasi oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses pendidikan tinggi dan koneksi sosial.

Isu kesetaraan ini juga berkaitan dengan gender, di mana perempuan di beberapa daerah masih dipinggirkan dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Hal serupa dialami oleh penyandang disabilitas, suku terasing, atau kelompok minoritas agama yang sering kali terhambat untuk mengakses pendidikan berkualitas atau pekerjaan yang adil.

Indonesia adalah negara yang majemuk, baik dari segi etnis, agama, bahasa, budaya, maupun status sosial ekonomi. Kemajemukan ini menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan sistem sosial yang benar-benar adil. Banyak kelompok masyarakat yang hingga kini masih belum menikmati hak-hak mereka secara setara, terutama dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Misalnya, masyarakat di daerah terpencil, suku terasing, anak-anak dari keluarga miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas agama atau etnis masih mengalami berbagai bentuk hambatan dalam mengakses pendidikan yang layak atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Dari segi gender, anak perempuan di beberapa daerah masih dianggap tidak perlu melanjutkan pendidikan tinggi, karena peran domestik lebih dikedepankan. Hal ini menyebabkan partisipasi pendidikan dan akses kerja formal bagi perempuan menjadi lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan besar, baik dalam sistem pendidikan reguler yang belum ramah disabilitas, maupun di dunia kerja yang belum menyediakan akomodasi yang inklusif.

Dalam dunia kerja, kesetaraan juga belum sepenuhnya tercapai. Akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak seringkali dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, koneksi sosial, lokasi geografis, dan bahkan identitas sosial tertentu. Masih banyak kasus diskriminasi dan marginalisasi, baik yang bersifat terbuka maupun terselubung, yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu dalam proses perekrutan atau promosi jabatan.

Pemerintah Indonesia memang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ketimpangan ini, seperti: 1) Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin, 2) Kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dan kelompok 3T, 3) Program vokasi dan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan masyarakat yang kurang beruntung.

Namun demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil menghilangkan kesenjangan yang ada. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran kolektif tentang pentingnya kesetaraan serta belum maksimalnya pendidikan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme dalam sistem pendidikan formal.

Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia yang majemuk, kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum atau administratif. Dibutuhkan pendekatan kultural dan edukatif yang mampu membentuk kesadaran kritis peserta didik agar memahami bahwa setiap orang, apapun latar belakangnya, memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi diri dan mendapatkan kehidupan yang layak.

Pendidikan yang responsif terhadap keberagaman adalah kunci untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan empati terhadap ketidakadilan yang masih terjadi di masyarakat. Inilah tantangan sekaligus peluang bagi dunia pendidikan di Indonesia untuk mengambil peran penting dalam mendorong terwujudnya kesetaraan sejati.

B. Peran Pendidikan dalam Membangun Kesadaran Kesetaraan

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk kesadaran peserta didik mengenai pentingnya kesetaraan dalam kehidupan sosial, khususnya dalam hal akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, pendidikan juga merupakan media untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Kesetaraan bukanlah semata-mata soal memberi perlakuan yang sama, tetapi tentang mengakui dan memahami perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, gender, dan kemampuan individu, serta memberikan dukungan yang adil agar setiap orang dapat berkembang secara optimal. Dalam konteks ini, pendidikan harus menjadi alat untuk membongkar ketidakadilan struktural dan sosial yang telah lama bercokol dalam sistem masyarakat.

a. Pendidikan sebagai Alat Emansipasi Sosial

Tokoh-tokoh pendidikan seperti Ki Hadjar Dewantara telah lama menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini, pendidikan bukan hanya tentang mengisi otak dengan ilmu, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk karakter yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial. Dengan pendidikan yang berkualitas dan merata, masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan baik karena kemiskinan, disabilitas, atau latar belakang budaya memiliki kesempatan untuk bangkit dan memperjuangkan hak-haknya.

Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan kritis, juga menyatakan bahwa pendidikan harus bersifat pembebasan (*liberation*), bukan penindasan. Pendidikan harus mendorong

peserta didik untuk berpikir kritis tentang realitas sosial dan memahami bahwa ketidaksetaraan bukan sesuatu yang alamiah, melainkan produk dari struktur yang bisa diubah.

b. Pendidikan Menanamkan Kesadaran Kritis dan Empati Sosial

Melalui proses pendidikan, peserta didik diajak untuk menyadari bahwa tidak semua orang memiliki titik awal yang sama dalam kehidupan. Ada yang terlahir dari keluarga berkecukupan, sementara yang lain harus berjuang keras hanya untuk menyelesaikan pendidikan dasar. Kesadaran seperti ini penting untuk membentuk empati sosial, yang menjadi landasan dalam memperjuangkan kesetaraan.

Pendidikan juga harus mendorong siswa untuk menganalisis fenomena ketimpangan sosial yang terjadi di sekitarnya misalnya, mengapa masih banyak anak tidak bersekolah? Mengapa penyandang disabilitas sulit diterima kerja? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mendorong siswa berpikir kritis dan menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakat.

c. Pendidikan Multikultural sebagai Pendekatan

Salah satu pendekatan yang efektif untuk membangun kesadaran kesetaraan adalah melalui pendidikan multikultural. Pendekatan ini mengajarkan siswa untuk memahami, menerima, dan menghargai perbedaan, serta mendorong inklusivitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Melalui pendidikan multikultural, siswa belajar bahwa:

- a Perbedaan bukanlah penghalang, tetapi kekayaan.
- b Semua orang berhak mendapat perlakuan adil, meskipun berbeda dalam latar belakang.
- c Toleransi dan kerjasama lintas perbedaan adalah kunci harmoni sosial.

Pendidikan multikultural juga mendorong guru untuk mengembangkan materi ajar yang inklusif, yang mencerminkan realitas keberagaman siswa. Misalnya, penggunaan teks bacaan dari berbagai budaya, studi kasus dari kelompok minoritas, atau kegiatan kelas yang mengangkat isu-isu sosial di sekitar mereka.

d. Sekolah sebagai Ruang Sosialisasi Nilai Kesetaraan

Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga miniatur masyarakat di mana peserta didik berinteraksi dengan individu lain dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, sekolah memiliki potensi besar untuk menjadi ruang belajar nilai-nilai kesetaraan melalui praktik nyata seperti:

- a Budaya sekolah yang menghargai perbedaan dan menolak diskriminasi.
- b Adanya kebijakan anti-bullying dan penghormatan terhadap hak siswa.
- c Kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan semua kalangan tanpa kecuali.

Di sekolah yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan, siswa bukan hanya belajar teori, tetapi juga mengalami langsung bagaimana pentingnya keadilan dalam interaksi sosial sehari-hari.

e. Peran Guru dalam Menumbuhkan Kesadaran Kesetaraan

Guru adalah agen perubahan dalam pendidikan. Peran mereka sangat penting dalam mengajarkan dan memberi teladan nilai-nilai kesetaraan. Guru yang sadar akan pentingnya pluralisme dan keadilan akan:

- a Menghindari perlakuan diskriminatif di kelas.
- b Memberikan perhatian khusus pada siswa yang kurang mampu atau tertinggal.
- c Menyediakan ruang diskusi untuk membahas isu-isu sosial secara terbuka.

Penulis menyimpulkan Pendidikan memainkan peran vital dalam membentuk kesadaran kesetaraan karena ia menjangkau lapisan masyarakat sejak usia dini dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat termasuk penguatan pendidikan karakter, integrasi nilai multikultural, dan peran aktif guru pendidikan dapat menjadi jalan utama menuju masyarakat yang lebih adil, setara, dan menghargai keberagaman. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga menjadi warga negara yang sadar akan hak dan tanggung jawab sosialnya.

Mewujudkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan Pancasila. Namun, kenyataannya, penerapan prinsip kesetaraan tersebut di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan sistemik yang kompleks. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berasal dari kebijakan dan birokrasi, tetapi juga dari cara pandang masyarakat terhadap keberagaman, perbedaan kelas sosial, serta stereotip terhadap kelompok tertentu.

Beberapa tantangan utama dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan dan pekerjaan di Indonesia antara lain:

a. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan ekonomi yang masih sangat tinggi. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas karena:

- a Tidak mampu membayar biaya pendidikan, transportasi, atau perlengkapan sekolah.
- b Harus bekerja membantu orang tua sejak usia dini, sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas.

- c Mengalami keterbatasan gizi dan kesehatan yang memengaruhi konsentrasi belajar.

Ketimpangan ini berdampak langsung terhadap kesempatan kerja, karena pendidikan yang rendah membatasi kemampuan individu bersaing di pasar tenaga kerja formal.

b. Ketimpangan Geografis dan Infrastruktur

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan, termasuk dalam penyediaan layanan pendidikan dan pekerjaan. Wilayah-wilayah terpencil atau 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sering kali mengalami:

- a Kekurangan guru berkualitas.
- b Fasilitas sekolah yang minim.
- c Akses transportasi yang sulit.
- d Keterbatasan jaringan internet atau teknologi informasi.

Kondisi ini memperkuat kesenjangan antara peserta didik di perkotaan dan di pedesaan. Akibatnya, peluang mereka dalam melanjutkan pendidikan tinggi atau mengakses pekerjaan profesional juga terbatas.

c. Diskriminasi dan Stereotip Sosial

Diskriminasi berbasis suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik masih menjadi penghalang dalam mewujudkan kesetaraan. Contohnya:

- a Perempuan di beberapa budaya masih diprioritaskan untuk menikah muda ketimbang bersekolah tinggi.
- b Penyandang disabilitas masih sulit diterima di banyak sekolah dan tempat kerja karena dianggap “tidak produktif.”
- c Kelompok minoritas etnis atau agama kerap mengalami penolakan sosial atau pembatasan akses terhadap peluang ekonomi.

Diskriminasi ini berakar dari stereotip dan prasangka sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun dan jarang dikritisi dalam ruang pendidikan.

d. Sistem Pendidikan yang Belum Inklusif

Meski kebijakan pendidikan inklusif sudah ada, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi hambatan:

- a Kurangnya pelatihan guru dalam menangani siswa dari latar belakang berbeda, termasuk siswa berkebutuhan khusus.
- b Kurikulum yang belum cukup mengakomodasi nilai-nilai keberagaman dan kesetaraan.
- c Minimnya pendekatan pedagogis yang adaptif terhadap kondisi siswa secara individual.

Akibatnya, siswa yang berasal dari kelompok marjinal sering merasa tidak diterima secara sosial maupun akademik, yang kemudian berdampak pada motivasi dan prestasi belajar.

e. Ketimpangan Akses Terhadap Teknologi dan Informasi

Perkembangan teknologi telah membuka banyak peluang baru dalam pendidikan dan pekerjaan. Namun, tidak semua kelompok masyarakat dapat mengakses teknologi secara merata. Digital divide atau kesenjangan digital menyebabkan:

- a Siswa di daerah terpencil tertinggal dalam penguasaan teknologi.
- b Informasi tentang beasiswa, pelatihan kerja, atau lowongan pekerjaan tidak sampai ke kelompok masyarakat miskin atau pinggiran.
- c Ketergantungan pada teknologi tinggi di dunia kerja menciptakan hambatan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan digital dasar.

f. Minimnya Kesadaran dan Pendidikan Nilai Kesenyamaan

Pendidikan selama ini cenderung berfokus pada aspek kognitif dan akademik, sementara pendidikan nilai dan karakter masih belum menjadi fokus utama. Akibatnya:

- a Peserta didik tumbuh tanpa memahami pentingnya memperjuangkan hak yang sama bagi semua orang.
- b Guru pun sering kali tidak menyadari perannya sebagai agen perubahan sosial.
- c Tidak ada ruang yang cukup untuk berdialog tentang ketidakadilan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

g. Implementasi Kebijakan yang Lemah

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan afirmatif, seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar), pendidikan inklusif, atau kuota untuk kelompok minoritas dalam rekrutmen kerja, implementasinya masih jauh dari ideal. Hambatan seperti birokrasi yang rumit, kurangnya sosialisasi, hingga korupsi anggaran membuat kebijakan tersebut tidak efektif.

Penulis dapat menyimpulkan Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa mewujudkan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan di Indonesia membutuhkan upaya yang multi-level dan menyeluruh, mulai dari reformasi kebijakan, pelatihan guru, perubahan budaya sekolah, hingga penguatan pendidikan karakter berbasis pluralisme. Tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik; yang lebih penting adalah membangun kesadaran dan komitmen sosial terhadap pentingnya kesetaraan bagi semua warga negara.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif. Di mana dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Metode kualitatif deskriptif dapat dilaksanakan dengan metode pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, jurnal, catatancatatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, analisis data yang

diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif atau deskriptif (Margono, 2003; p.39). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan akan masalah yang sedang diselidiki (Anggito, Albi & Setiawan, 2018; p. 14).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan pembahasan mengenai *kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan*, dapat diperoleh beberapa hasil utama sebagai berikut:

a. Kesetaraan sebagai Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Setiap warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, kondisi fisik, atau status sosial ekonomi, berhak memperoleh akses dan kesempatan yang sama untuk berkembang.

b. Pendidikan sebagai Kunci Mewujudkan Kesetaraan

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kritis dan empati sosial terhadap pentingnya kesetaraan. Melalui pendidikan yang inklusif, multikultural, dan berkeadilan, peserta didik dibekali dengan pemahaman bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan penghalang. Pendidikan yang responsif terhadap perbedaan mampu memberdayakan kelompok marjinal dan mengurangi ketimpangan sosial.

c. Praktik Kesetaraan di Bidang Pendidikan dan Pekerjaan Masih Terbatas

Walaupun pemerintah telah membuat berbagai kebijakan seperti *Kartu Indonesia Pintar (KIP)*, pendidikan inklusif, dan program afirmatif bagi kelompok 3T, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Ketimpangan akses, diskriminasi gender, keterbatasan infrastruktur, serta stereotip sosial masih menjadi hambatan besar bagi terciptanya kesetaraan sejati.

d. Tantangan Struktural dan Kultural Masih Kuat

Ketimpangan ekonomi, geografis, dan digital memperdalam kesenjangan kesempatan antara kelompok masyarakat. Selain itu, pandangan sosial yang bias terhadap perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas memperburuk kondisi ketidakadilan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai kesetaraan membuat upaya pemerintah belum maksimal.

e. Peran Guru dan Sekolah Sangat Vital.

Guru berperan sebagai agen perubahan sosial yang dapat menanamkan nilai-nilai pluralisme, keadilan, dan empati kepada peserta didik. Sekolah, sebagai miniatur masyarakat, menjadi ruang penting untuk menerapkan budaya anti-diskriminasi dan membangun lingkungan yang menghargai perbedaan.

Pembahasan

Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan adalah fondasi utama bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Tanpa kesetaraan, potensi sumber daya manusia tidak akan berkembang secara optimal, dan ketimpangan sosial akan terus berlanjut. 2) Pendidikan memegang peran sentral dalam menumbuhkan kesadaran kesetaraan. Melalui pendidikan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, multikulturalisme, dan keadilan sosial, generasi muda dapat tumbuh menjadi warga negara yang menghargai perbedaan dan menolak diskriminasi. 3) Upaya mewujudkan kesetaraan membutuhkan sinergi antara kebijakan, budaya, dan kesadaran sosial. Tidak cukup hanya dengan regulasi formal, tetapi perlu juga pendekatan kultural dan edukatif yang menanamkan nilai keadilan sejak dini. 4) Pemerataan akses dan kualitas pendidikan menjadi kunci untuk mempersempit kesenjangan dalam dunia kerja. Ketika setiap individu mendapatkan pendidikan yang layak, maka peluang kerja dan mobilitas sosial juga akan meningkat secara merata. 5) Membangun kesetaraan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, lembaga pendidikan, dunia kerja, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk menciptakan sistem yang inklusif, adil, dan menghargai martabat setiap manusia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesempatan yang sama (equal opportunity) adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan faktor ekonomi, geografis, gender, atau kondisi fisik. Dalam dunia kerja, semua individu berhak dipertimbangkan secara adil sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi mereka. Kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan adalah hak dasar yang harus diperjuangkan oleh semua pihak. Membentuk peserta didik agar memahami pentingnya kesetaraan merupakan langkah awal menuju masyarakat yang adil dan beradab. Melalui pendidikan yang inklusif dan pembiasaan sikap toleran di sekolah, peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang peduli, adil, dan menghargai perbedaan. Kesetaraan dalam pendidikan

dan pekerjaan adalah prinsip keadilan yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak dan peluang yang sama untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang ekonomi, jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, atau asal daerah.

1) Dalam pendidikan, kesetaraan berarti semua anak terlepas dari status sosial atau kondisi pribadimempunyai kesempatan yang sama untuk bersekolah, mendapatkan pendidikan berkualitas, dan berkembang secara optimal. 2) Dalam pekerjaan, kesetaraan berarti setiap orang yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sama berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk direkrut, dipromosikan, dan mendapatkan perlakuan adil di tempat kerja. Kesetaraan tidak selalu berarti "sama rata", tetapi berarti memberikan akses dan dukungan yang adil agar semua orang bisa mencapai potensi terbaik mereka.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik pendidikan dan ketenagakerjaan Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Dewantara, K. H. (1962). *Pendidikan: Pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Freire, P. (2005). *Pendidikan kaum tertindas* (Terjemahan). Jakarta: LP3ES.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. (2022). *Laporan kesetaraan kesempatan kerja di Indonesia*. Jakarta: Kemenaker.
- Komnas HAM. (2021). *Laporan tahunan kesetaraan hak pendidikan dan pekerjaan*.
- Mulyasa, E. (2015). *Manajemen dan kepemimpinan pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, H., & Wijaya, T. (2019). Peran pendidikan karakter dalam membentuk kesadaran sosial peserta didik. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(1), 11–25. <https://doi.org/10.21831/jpk.v9i1.23245>
- Nuryanto, A. (2021). *Kesetaraan gender dalam pendidikan dan dunia kerja di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Putri, R. A., & Supriyadi, S. (2021). Analisis kesempatan kerja yang setara di Indonesia: Perspektif gender dan pendidikan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 45–60. <https://doi.org/10.31002/jepi.v22i1.5678>
- Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Gadjah Mada. (2022). *Laporan tahunan: Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia*. Yogyakarta: PSGA UGM.

- Sari, M. N., & Hidayat, D. N. (2020). Pendidikan inklusif dan kesetaraan akses pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(3), 251–262. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v25i3.1234>
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta: Grasindo.
- UNESCO. (2017). *Education for All Global Monitoring Report*.
- UNESCO. (2020). *Education and gender equality report*. Paris: UNESCO Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2020). *Education and Gender Equality Report*. Paris: UNESCO Publishing.